

Judul : Cegah peredaran narkoba, perketat pengawasan pintu masuk imigrasi
Tanggal : Kamis, 18 Desember 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 10

Cegah Peredaran Narkoba

Perketat Pengawasan Pintu Masuk Imigrasi

SENAYAN meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan di pintu masuk Indonesia saat Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Anggota Komisi XIII DPR Meity Rahmatia menjelaskan, peningkatan itu untuk memantau pergerakan keluar masuk warga negara asing yang biasanya meningkat di akhir tahun. Pastikan tidak terjadi pelanggaran administrasi keimigrasian, *overstay* dan pelanggaran lainnya.

"Pengawasan dan pemeriksaan penting mencegah pihak yang ingin memanfaatkan momen Nataru untuk mengganggu ketertiban dan keamanan dalam negeri," kata Meity dalam keterangannya, Selasa (16/12/2025).

Salah satu gangguan yang menjadi ancaman bagi masyarakat adalah peredaran barang haram seperti narkoba, terutama pada malam pergantian tahun. Masyarakat ingin suasana momen Nataru berlangsung nyaman, tertib, dan aman.

"Jangan ada gangguan bagi saudara-saudara kita yang merayakan Natal. Begitu pula saat pergantian tahun, agar dirayakan secara tertib dan aman," kata politikus PKS itu.

Dia menyebut, momen pergantian tahun kerap diidentikkan

dengan pesta yang berpotensi disalahgunakan untuk peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Apalagi, kondisi Indonesia yang pada 2025 bisa dikatakan berada di tahap darurat narkoba. Hampir tidak ada wilayah di Indonesia yang luput dari peredaran barang haram itu.

Bahkan, lanjutnya, 70-80 persen penghuni lapas dan rutan merupakan pengguna, pengedar, dan bandar narkoba yang tentunya mengancam masa depan generasi muda bangsa.

"Imigrasi harus mendukung pemberantasan dengan menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal dalam pengawasan dan pemeriksaan," tegasnya.

Sejauh ini, Meity melihat telah ada peningkatan kualitas pelayanan keimigrasian, salah satunya dengan penggunaan aplikasi All Indonesia. Dengan aplikasi ini proses kedatangan di bandara diharapkan berlangsung lebih cepat.

"Saya sangat mengapresiasi inovasi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan keimigrasian. Semoga ke depan, pelayanan keimigrasian kita semakin baik," ucapnya.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR Sugiat Santoso juga mengingatkan agar Ditjen Imigrasi memperkuat pengawasan untuk menekan potensi penyalahgunaan izin tinggal WNA selama periode



Meity Rahmatia

libur Nataru 2025. Pasalnya, momentum libur akhir tahun selalu diikuti lonjakan kedatangan wisatawan mancanegara.

"Sehingga risiko *overstay*, penyalahgunaan izin tinggal (PISA), hingga pelanggaran administrasi keimigrasian perlu diantisipasi secara serius," terang Sugiat.

Komisi XIII, lanjutnya, akan terus mengawasi dan mendorong kinerja Ditjen Imigrasi terkait izin tinggal WNA selama musim Nataru ini. Diharapkan, Ditjen Imigrasi bisa mendisiplinkan petugas-petugasnya supaya tidak main-main dalam persoalan ini.

Karena, dari data Ditjen Imigrasi, sepanjang tahun 2023 terdapat lebih dari 3.200 kasus pelanggaran keimigrasian, termasuk *overstay* dan penyalahgunaan visa

turis. Sedangkan pada 2024, Bali sebagai pintu masuk utama wisatawan mencatat lebih dari 1.200 pelanggaran, mulai dari penyalahgunaan visa oleh pekerja asing ilegal hingga kasus PISA pada pemegang izin tinggal sementara.

Sugiat mengingatkan, pengetatan pengawasan tidak boleh berubah jadi tindakan yang mempersulit wisatawan yang taat aturan.

"Bekerjalalah sesuai tupoksi, sesuai kewajiban dan fokus menuntaskan persoalan ini," tegas legislator Fraksi Partai Gerindra itu.

Dia bilang, Ditjen Imigrasi sebenarnya telah memiliki protokol dan standar operasi yang memadai. Tantangan terbesar justru memastikan implementasi yang konsisten, terutama di bandara internasional dengan arus masuk tinggi seperti Soekarno-Hatta, Ngurah Rai, dan Hang Nadim. Jika dilakukan dengan disiplin, persoalan yang dikhawatirkan bisa dituntaskan.

Sugiat menambahkan, meskipun Pemerintah menargetkan penerimaan devisa besar dari kunjungan wisatawan akhir tahun, peningkatan jumlah turis tidak boleh menjadi alasan untuk melonggarkan pengawasan.

"Jangan sampai demi mengejar jumlah, SOP dan protap malah dilonggarkan," tegasnya.

Di momen Nataru kali ini, Kanwil Ditjen Imigrasi Jakarta

sebagai pintu gerbang utama keluar masuk warga telah melakukan sejumlah persiapan.

Kepala Kanwil Pamuji Raharja menegaskan, tiap bidang harus memahami instruksi secara teknis, menjalankannya dengan disiplin, dan memastikan tidak ada gangguan pada pelayanan.

"Di periode Nataru yang memiliki intensitas tinggi, Kantor Imigrasi (Kanim) Soekarno-Hatta memiliki peran vital dalam menjaga keamanan dan kelancaran mobilitas masyarakat," kata Pamuji.

Kepada jajarannya, dia mengingatkan bahwa kesiapan teknis lintas unit menjadi kunci. Mulai dari layanan dokumen perjalanan, penguatan pemeriksaan di TPI, pengawasan intelijen di titik rawan, hingga stabilitas sistem teknologi informasi.

"Layanan darurat paspor dan izin tinggal wajib berjalan dengan prosedur yang tepat, penguatan personel di TPI harus konsisten, titik rawan perlu dipantau intensif, dan sistem harus dipastikan stabil," tegasnya.

Kepala Kanim Soekarno-Hatta Galih P. Kartika Perdana menambahkan, pola penugasan telah disiapkan secara adaptif berdasarkan prediksi lonjakan arus penumpang. Semua layanan, termasuk layanan darurat paspor dan izin tinggal tetap berjalan. ■ PVB